EVALUASI PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2013

PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

DISKUSI PUBLIK
Jakarta, 19 Desember 2013

WIKO SAPUTRA
Peneliti Kebijakan Ekonomi dan Publik
PERKUMPULAN PRAKARSA

PENDAHULUAN

- Penerimaan pajak berkontribusi sebesar 72 – 75 % terhadap total penerimaan negara.
- Setiap tahun penerimaan pajak selalu tidak mencapai target yang ditetapkan.
- Tahun 2013, diprediksi penerimaan pajak hanya sebesar 91,31% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2013, terendah dalam tiga tahun terakhir.
- Indonesia merupakan negara lower – middle income dengan tax rasio terendah.
- Perlu ada perbaikan yang lebih substansial terhadap kebijakan perpajakan di Indonesia.

PERKEMBANGAN PENERIMAAN NEGARA

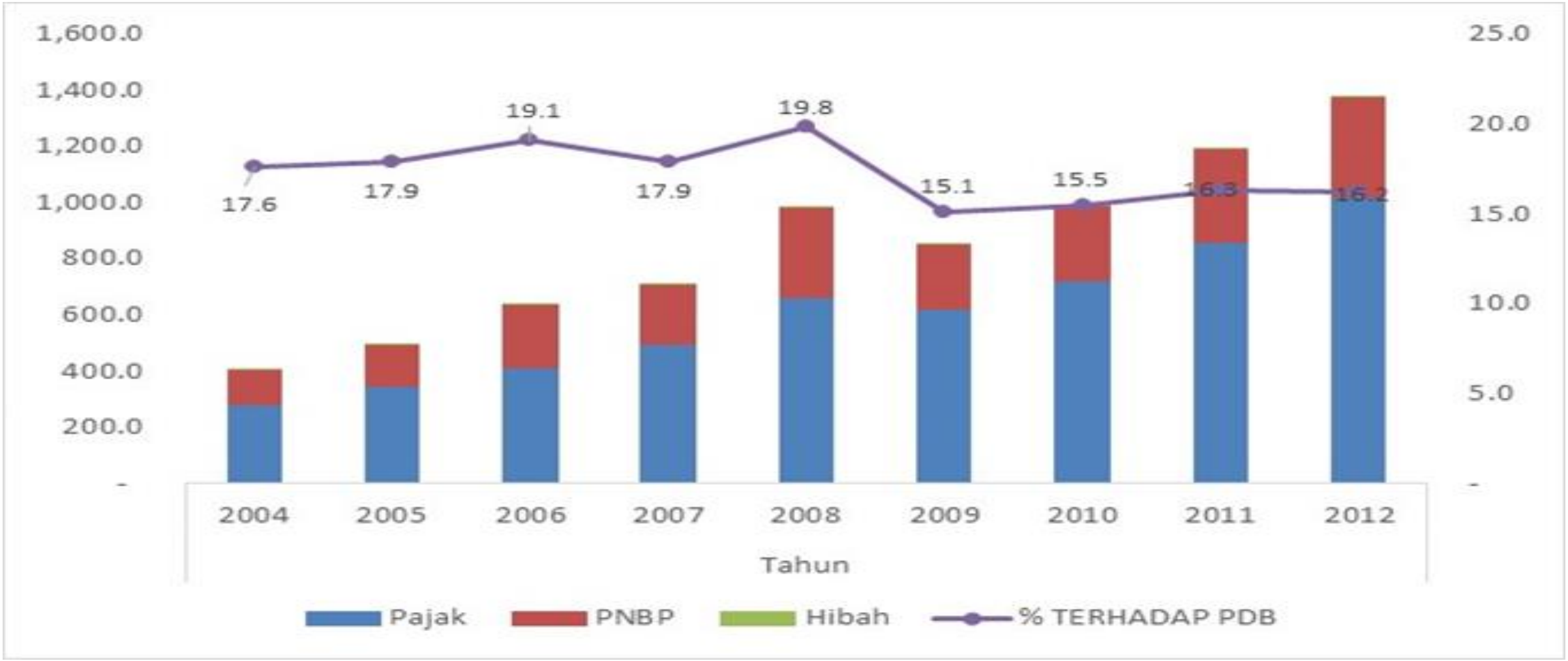

Sumber: Kemenkeu berbagai tahun (diolah)

SUMBER PENERIMAAN NEGARA

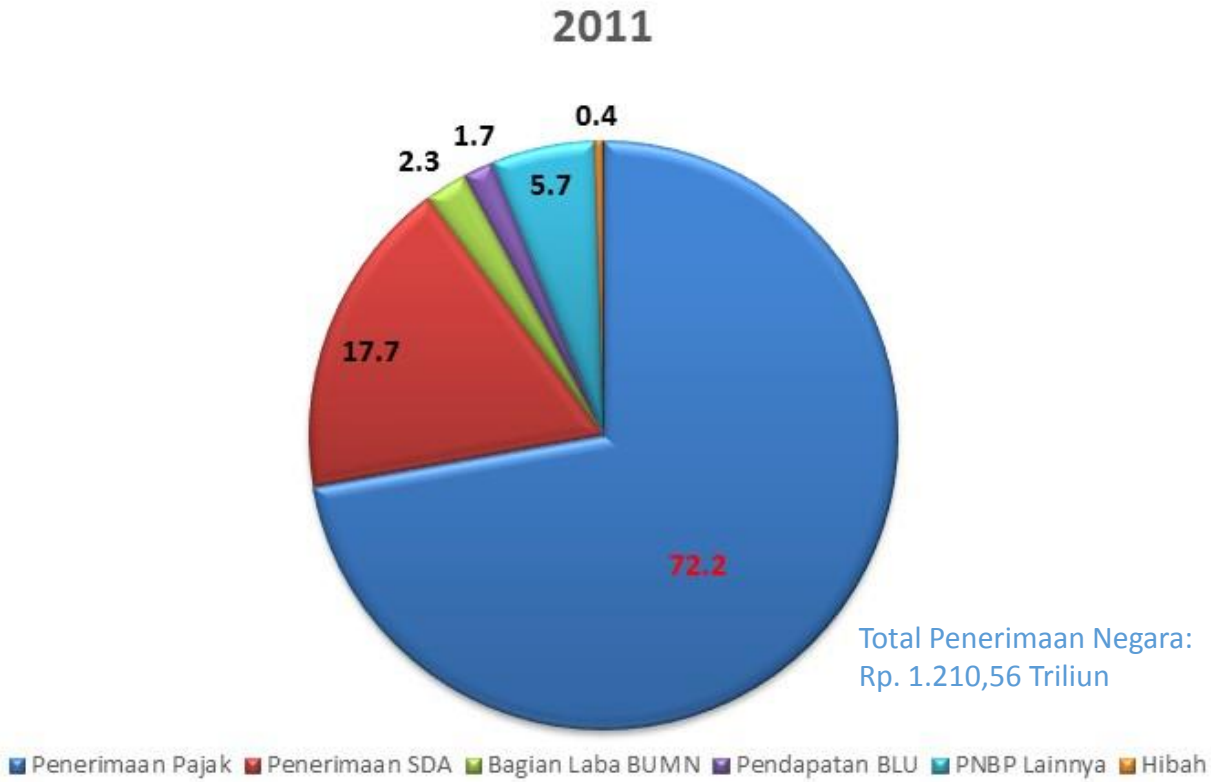

Total Penerimaan Negara:
Rp. 1.210,56 Triliun

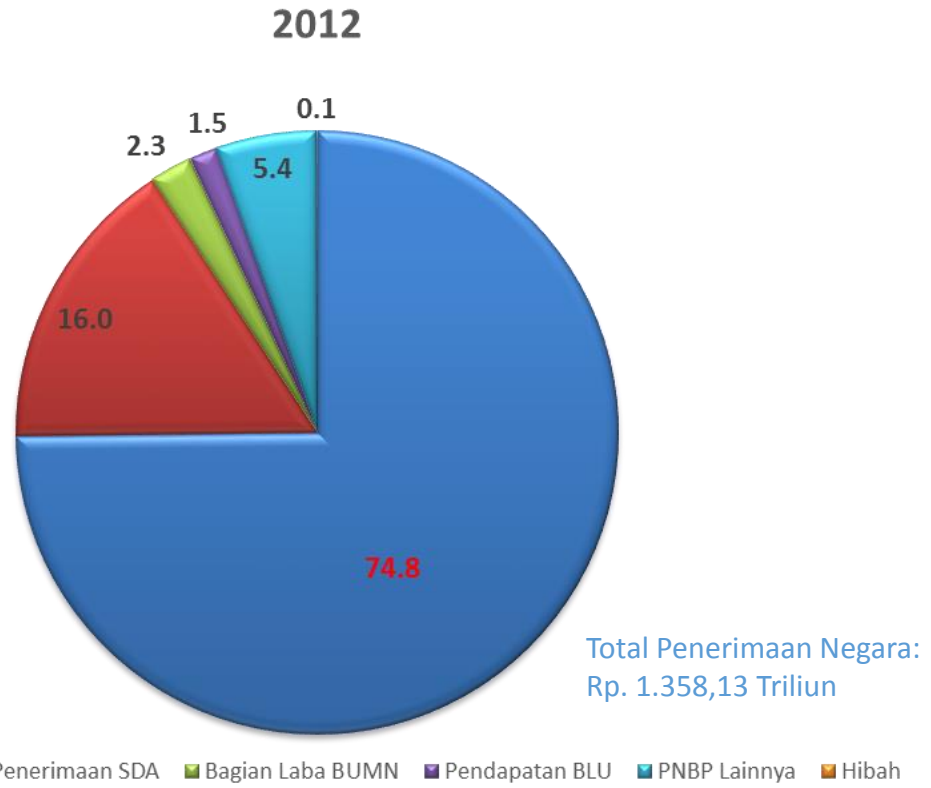

Total Penerimaan Negara:
Rp. 1.358,13 Triliun

Sumber: Kemenkeu, 2011 - 2012

TARGET PENERIMAAN NEGARA DALAM APBN-P 2013

Sumber Penerimaan Negara	APBN - P 2013	Persentase
Penerimaan Pajak	1,139.34	76.55
Penerimaan Sumberdaya Alam	201.70	13.55
Bagian Laba BUMN	35.45	2.38
PNBP Lainnya	83.83	5.63
Pendapatan BLU	23.49	1.58
Hibah	4.48	0.30
TOTAL	1,488.29	100.00

Sumber: Kemenkeu, APBN – P 2013

PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2008 - 2013

PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK DALAM NEGERI

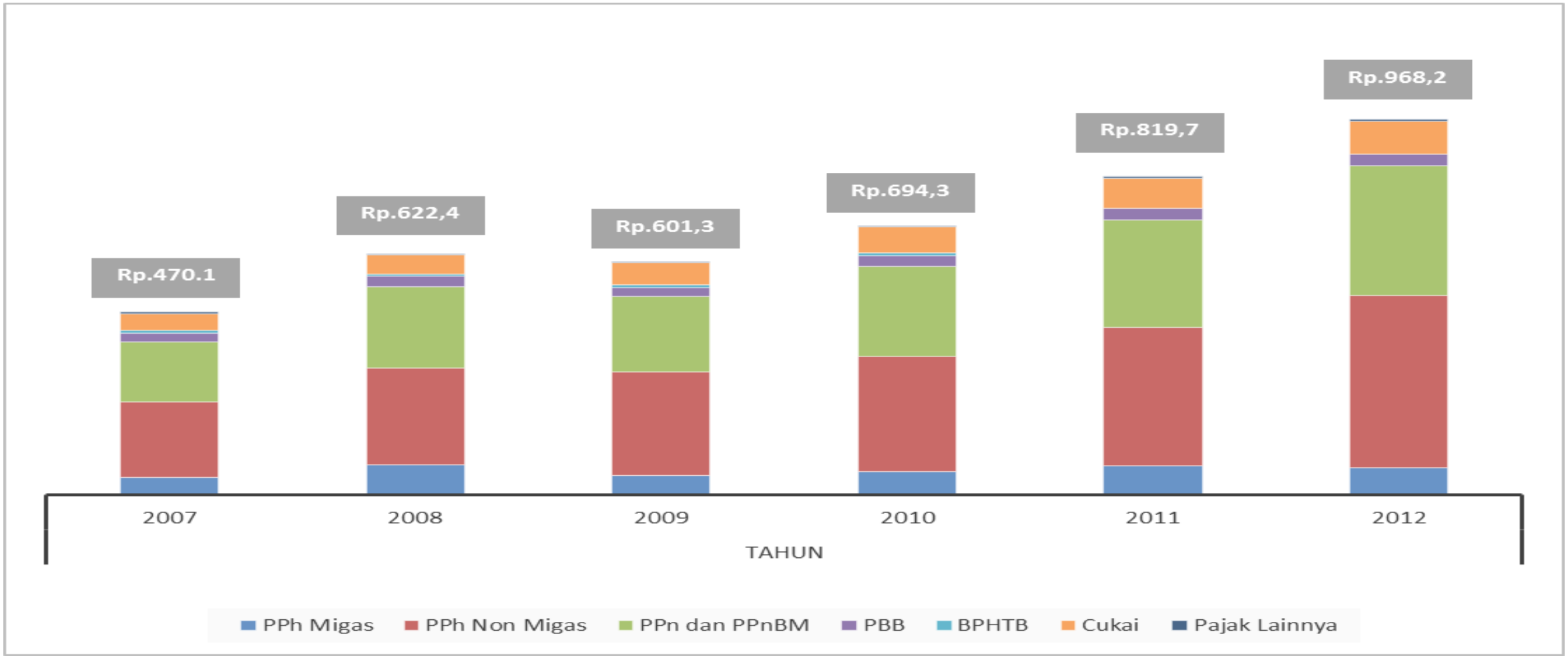

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2007 - 2012

PERKEMBANGAN PENERIMAAN PPh NON MIGAS

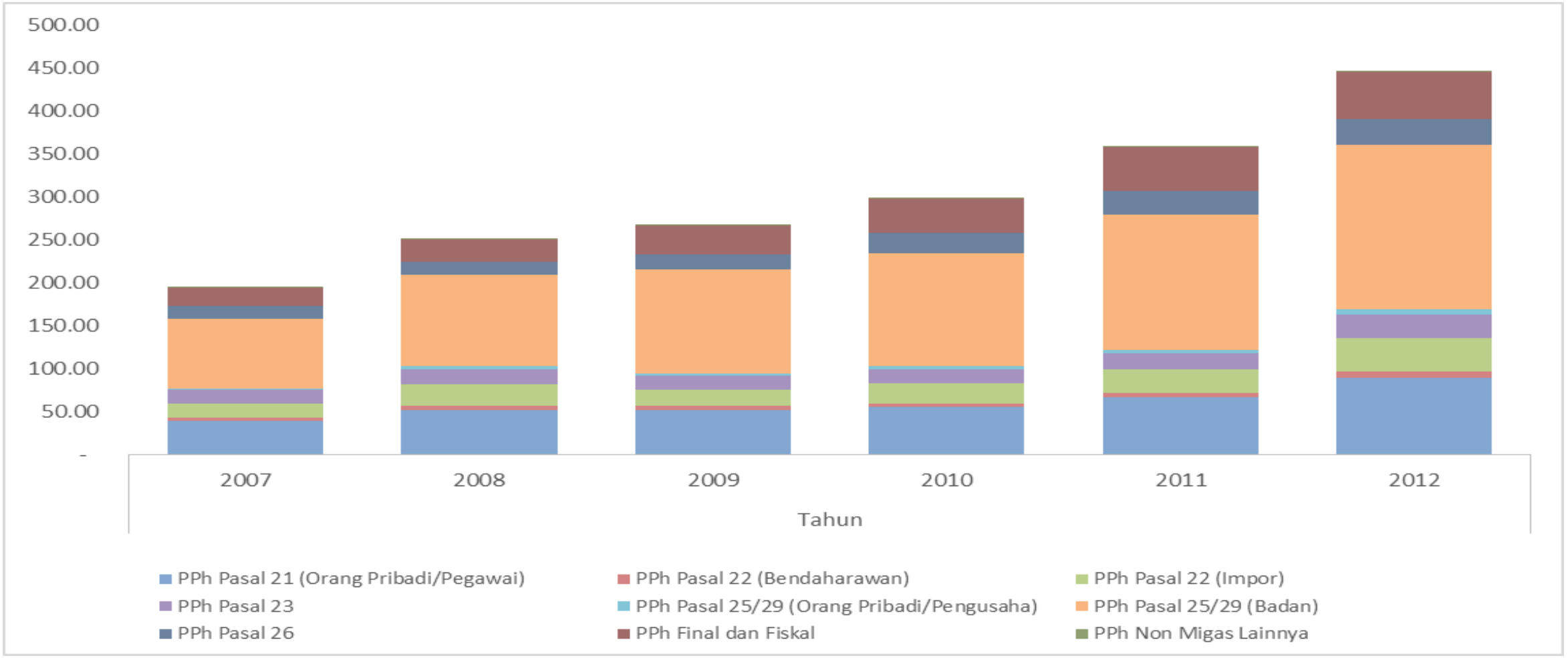

PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL

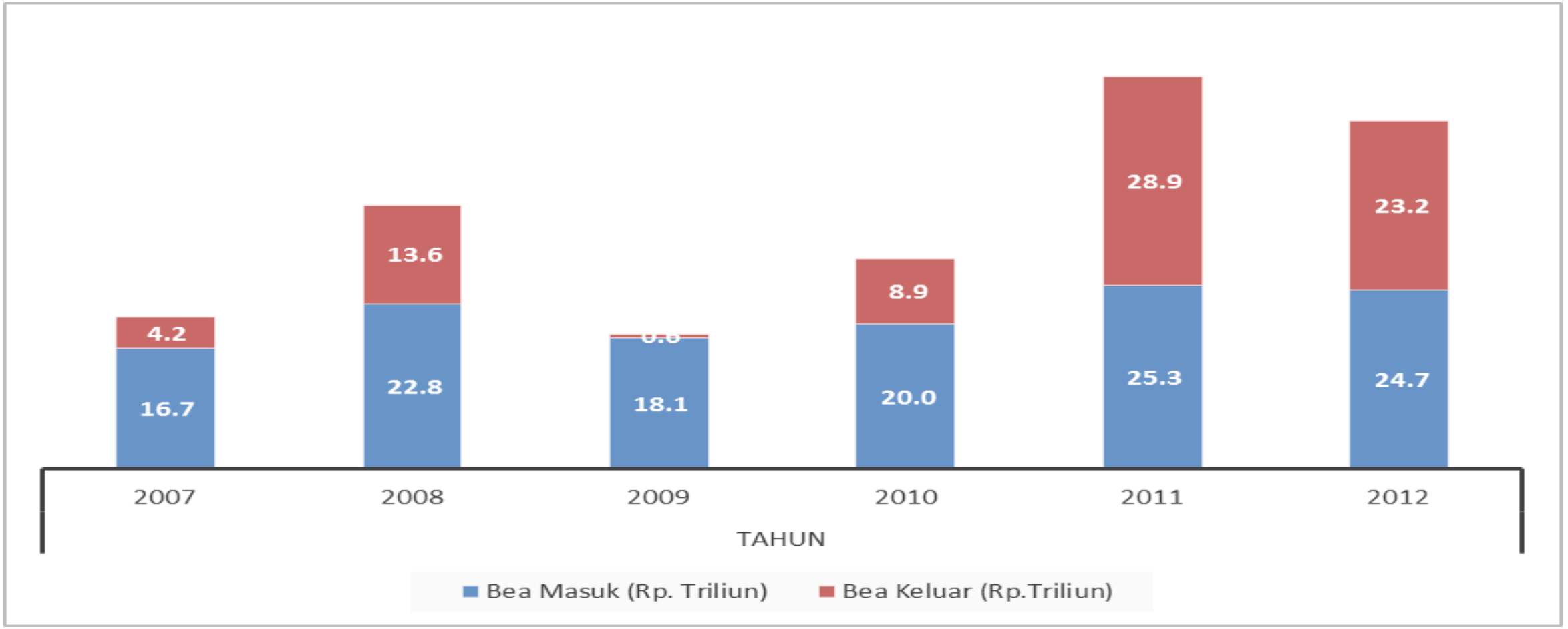

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2007 - 2012

PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH

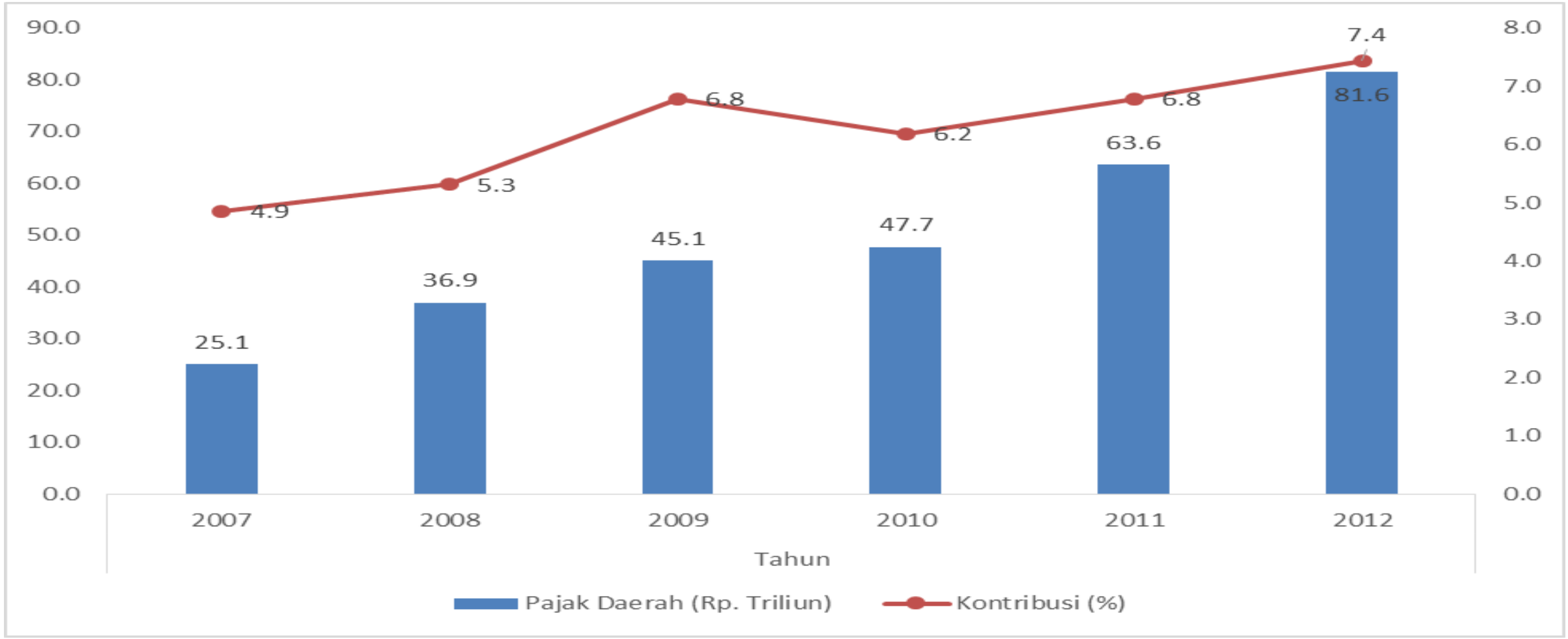

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal, 2007 - 2012

REALISASI PENERIMAAN PAJAK, 2011 – 2013

No	Jenis Pajak	2011			2012			2013		
		Realisasi (Rp. Triliun)	Target (Rp. Triliun)	Pencapaian (%)	Realisasi (Rp. Triliun)	Target (Rp. Triliun)	Pencapaian (%)	Realisasi* (Rp. Triliun)	Target (Rp. Triliun)	Pencapaian (%)
1	PPh Migas	73.09	65.23	112.05	83.46	64.59	129.22	80.06	70.76	113.15
2	PPh Non Migas	358.02	366.74	97.62	381.29	445.73	85.54	416.14	459.98	90.47
3	PPn dan PPnBM	277.80	298.44	93.08	337.58	335.24	100.70	369.70	423.70	87.26
4	PBB	29.89	29.05	102.89	28.96	29.68	97.57	25.79	27.34	94.31
5	Cukai	77.01	68.07	113.13	95.02	83.26	114.12	101.86	103.72	98.21
6	Pajak Lainnya	3.92	4.19	93.56	4.21	5.26	80.04	5.06	5.40	93.75
7	Pajak Perdagangan Internasional	54.09	46.93	115.26	49.65	47.94	103.57	41.71	48.42	86.14
	Total	873.82	878.65	99.45	980.17	1,011.70	96.88	1,040.32	1,139.32	91.31

Keterangan: * Hasil estimasi Prakarsa, 2013
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2011 - 2013

ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK 2013

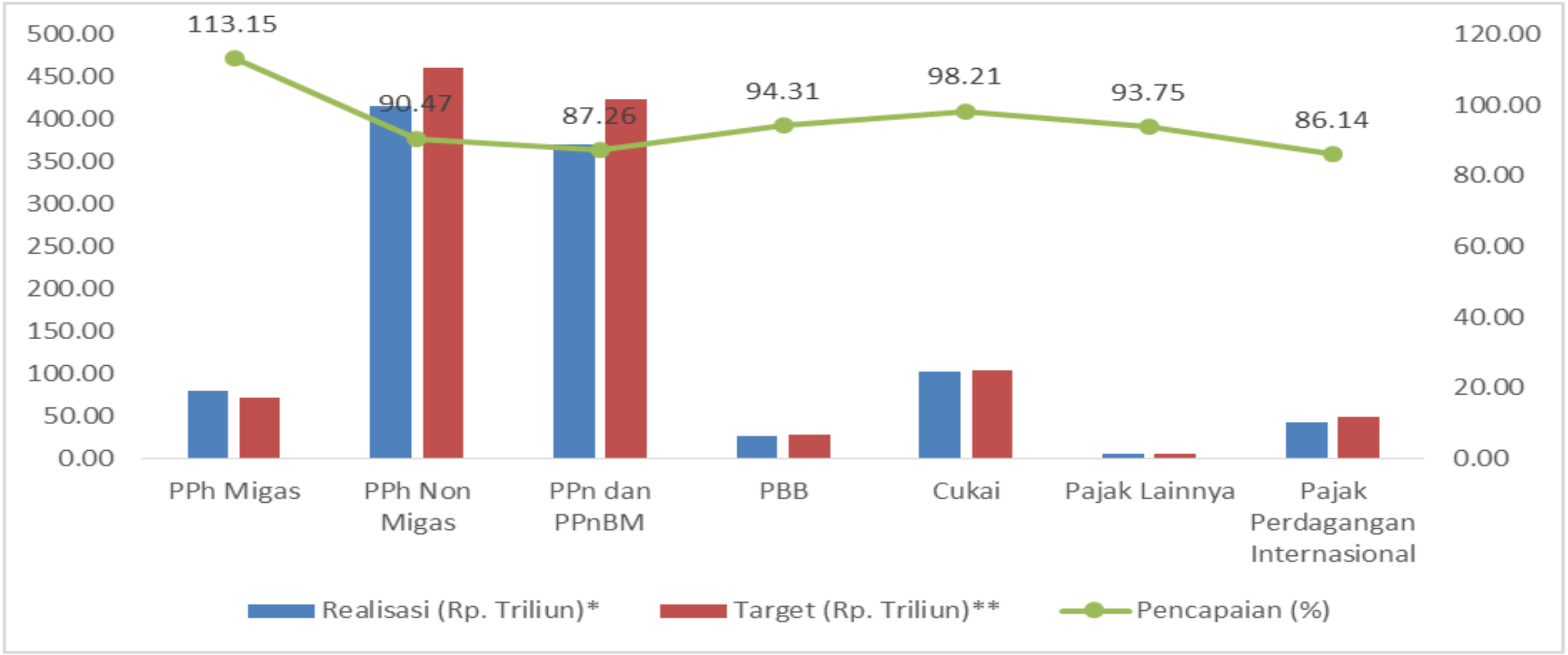

Keterangan: * Realisasi dari hasil estimasi Prakarsa **Target yang ditetapkan dalam APBN – P 2013
Sumber: Hasil Estimasi Prakarsa, 2013

PERMASALAHAN DALAM REALISASI PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2013

1. Otoritas perpajakan masih lemah, baik dari sisi kemampuan menjangkau wajib pajak maupun dari sisi inovasi atau terobosan kebijakan perpajakan. Sehingga wajar jika sumber-sumber penerimaan pajak potensial belum banyak yang tergali. Jumlah wajib pajak (perorangan dan badan) tidak kunjung naik secara signifikan.
2. Sumberdaya manusia di otoritas perpajakan masih kurang memadai, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kemampuan. Hal ini diperparah dengan banyaknya oknum pegawai dan pejabat perpajakan yang terlibat dalam praktik korupsi perpajakan.
3. Lemahnya sistem perencanaan, implementasi dan pengawasan di otoritas perpajakan sehingga target penerimaan tiap tahun sulit tercapai. Posisi otoritas perpajakan yang berada di bawah Kementerian Keuangan dan tidak berdiri sendiri juga mempengaruhi kinerja otoritas perpajakan.

LANJUTAN.....

4. Tingginya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelakan pajak (*tax evasion*) oleh wajib pajak badan dan pribadi. Banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia yang melakukan praktik ini. *Global Financial Integrity* (2011) merilis bahwa Indonesia menempati urutan kesembilan terbesar praktik 'haram' tersebut.
5. Tekanan krisis ekonomi global yang berdampak pada pelemahan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menyebabkan penerimaan pajak mengalami penurunan dari target yang ditetapkan. Meskipun potensi penerimaan sejatinya masih tinggi, namun pemerintah memberikan berbagai paket insentif pajak kepada perusahaan-perusahaan besar sehingga penerimaan pajak sulit dicapai.
6. Terjadinya goncangan pada sisi neraca perdagangan yang berdampak pada depresiasi mata uang rupiah menyebabkan munculnya kebijakan fiskal untuk menjaga keseimbangan makro ekonomi dan ini menyebabkan pemerintah mengeluarkan insentif perpajakan

TAX RASIO RENDAH, RUANG FISKAL SEMAKIN SEMPIT

Tax Rasio	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Total Penerimaan Pajak Pusat + Daerah	14.1	11.9	12.0	12.6	13.3
A. Pajak Pusat	13.3	11.1	11.2	11.8	12.3
1. Pajak Dalam Negeri	12.6	10.7	10.8	11.0	11.7
• PPh	6.6	5.7	5.5	5.8	6.2
○ PPh Orang Pribadi	1.1	1.0	0.9	0.9	1.2
○ PPh Badan	2.2	2.1	2.0	2.1	2.3
○ PPh Lainnya	3.4	2.5	2.6	2.7	2.8
• PPN	4.2	3.4	3.6	3.7	4.1
• Pajak Lainnya	1.7	1.6	1.7	1.5	1.4
2. Pajak Perdagangan Internasional	0.7	0.3	0.4	0.7	0.6
B. Pajak Daerah	0.7	0.8	0.7	0.9	1.0

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal, 2008 – 2012 (diolah)

PERBANDINGAN TAX RATIO INDONESIA DENGAN NEGARA – NEGARA LAIN

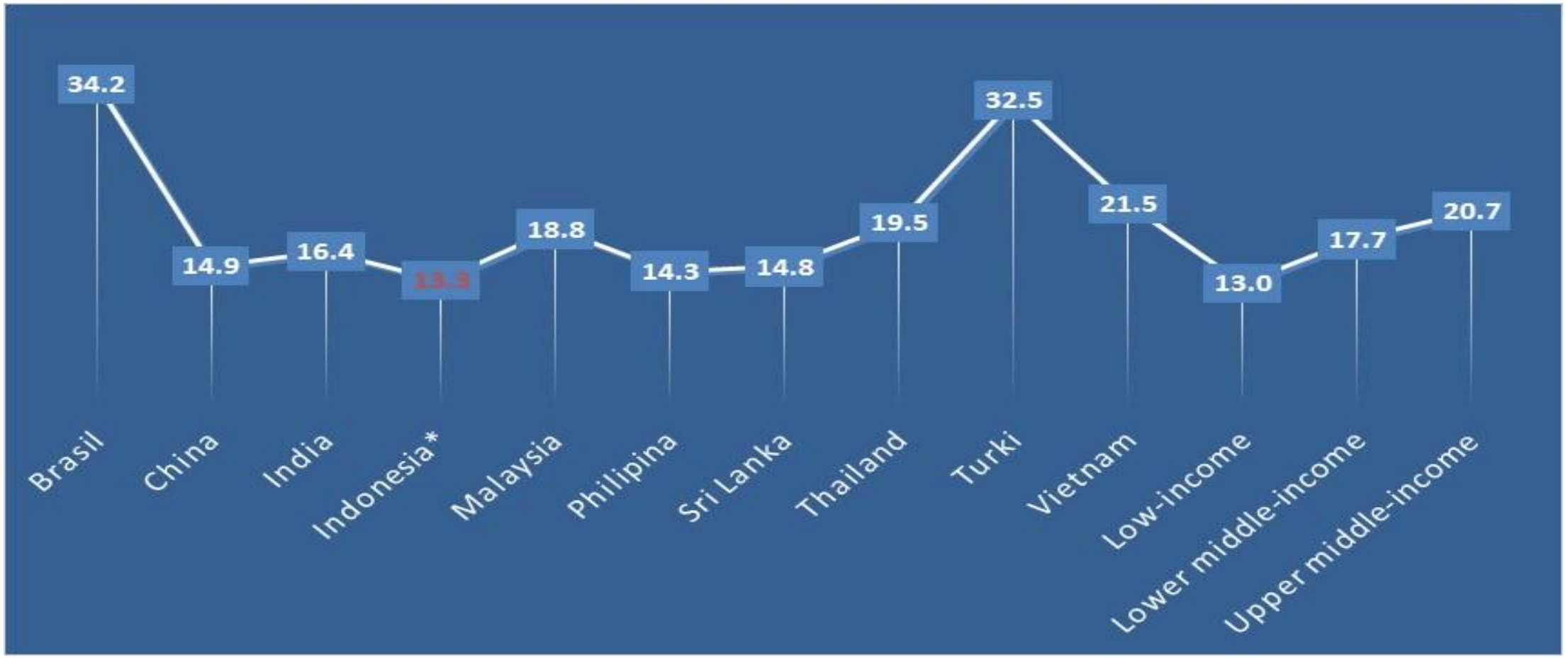

Keterangan: *Hasil kalkulasi Prakarsa dengan Pendekatan Tax Ratio dalam arti luas
Sumber: IMF 2011 (diolah)

PERLU ADANYA PENGAWASAN TERHADAP SEKTOR – SEKTOR YANG RAWAN TAX AVOIDANCE DAN TAX EVASION

Klasifikasi Lapangan Usaha	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Pertanian	1.8	1.7	1.4	1.3	1.2
Pertambangan dan Penggalian	12.6	5.7	8.1	8.1	6.3
Industri Pengolahan	9.7	10.8	11.2	12.5	12.6
Listrik, Gas dan Air Bersih	15.5	14.0	19.1	20.0	13.5
Konstruksi	4.3	3.6	3.5	3.8	3.2
Perdagangan, Hotel dan Restoran	9.7	9.5	9.6	10.4	10.3
Pengangkutan dan Komunikasi	10.6	8.4	7.9	7.5	7.1
Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	19.4	19.7	19.8	18.3	18.0
Jasa-jasa	5.4	5.3	4.5	4.5	4.2
TOTAL MENURUT SEKTOR	8.9	7.9	8.1	8.5	8.0

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal, 2008 – 2012 (diolah)

Sektor – sektor perlu pengawasan:

- Pertanian (terutama di sub sektor kehutanan dan perkebunan)
- Pertambangan dan penggalian (ekstraktif) terutama di sub sektor Migas dan Minerba
- Konstruksi
- Pengangkutan dan komunikasi terutama industri IT

Contoh kasus: Asian Agri Group

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Penguatan, pembenahan dan penambahan sumberdaya manusia di otoritas perpajakan harus segera dilakukan.
2. Penguatan kelembagaan dan sumber daya pemerintah daerah dalam meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak daerah.
3. Mengejar peningkatan *tax ratio* sebesar 19-26 % sesuai dengan rata-rata *tax ratio* negara *lower middle income*. Peningkatan tax ratio sebesar 1 % setiap tahun dan didistribusikan langsung untuk program-program jaminan sosial dan pelayanan dasar sehingga fungsi pajak sebagai barang publik menjadi sangat efektif.
4. Harus ada kebijakan yang sinkron antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal untuk mencapai keseimbangan ekonomi sehingga potensi penerimaan pajak tidak hilang akibat kebijakan yang kontra-produktif terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak.
5. Pengawasan dan penindakan praktik korupsi perpajakan, *tax avoidance* dan *tax evasion* yang dilakukan oleh banyak perusahaan (dalam negeri dan asing). Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara khusus membentuk "*task-force pajak dan transfer pricing*" untuk menangani kasus ini dengan bekerja sama dengan orotitas perpajakan.
6. Harus melakukan penguatan kerjasama bilateral dan multilateral mengenai sistem perpajakan antar negara, pertukaran informasi perpajakan dan lain-lain sehingga praktik-praktik *tax avoidance* dan *tax evasion* dapat diminimalisir dan ditindak secara cepat.
7. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) harus melakukan konsolidasi yang kuat untuk pengawasan dan advokasi perpajakan di Indonesia.

TERIMA KASIH

PRAKARSA

Welfare Initiative for Better Societies

Jln. Rawa Bambu I Blok A No. 8-E
Rt. 010 Rw. 06 Kel./Kec. Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520, Indonesia
Ph. +62 21 7811 798 Fax +62 21 7811 897
www.theprakarsa.org